**GLOBALISASI, PERDAGANGAN BEBAS, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
(Globalization, Free Trade, Capital Investment, And One Door Integrated Services)

Syprianus Aristeus

Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Email: syprianusaristeus@gmail.com

Tulisan Diterima: 16-05-2017, Direvisi: 30-05-2017, Disetujui Diterbitkan: 02-06-2017

ABSTRACTS

In order to make national economic development growing fast and to face global economy changes, on 27 April 2007, the government stipulated the Law Number 25/2007 on Capital Investment replaced the Law of Foreign Investment and domestic investment to attract and invest their capital in Indonesia. Both, it gives an incentive in customs and excises, and also provide facility for procedures of capital investment permits. This article discusses the implementation of one door integrated services in capital investment that in fact, it gives easiness for investors to invest their capital in Indonesia that its implementation evidently, uses distinct name or term by institutions that handle it. As for, its practice of capital investment permit, in the future should provide simplicity to investors in around Indonesia with one door integrated services by amendment or replace the Presidential Decree No. 27/2009.

Keywords: *capital investment, one door integrated services*

ABSTRAK

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta menghadapi perubahan perekonomian global, pada tanggal 27 April 2007 diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk menarik investasi dan menanamkan modalnya di Indonesia. Selain memberikan insentif di bidang perpajakan dan pabean juga memberi kemudahan dalam tata cara pemberian izin penanaman modal. Adapun makalah ini membahas mengenai penerapan pelayanan terpadu satu pintu yang telah memberikan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia yang pelaksanaannya ternyata mempergunakan nama atau istilah yang berbeda-beda oleh badan yang menanganinya. Adapun penerapan perizinan penanaman modal di masa yang akan datang harus dapat memberikan kemudahan kepada para penanam modal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara pelayanan terpadu satu pintu dengan mengubah atau mengganti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.

Kata Kunci: *Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu*

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 Internasionalisasi dari kegiatan masyarakat dunia dalam hampir semua bidang akan semakin meningkat dan membawa kita pada perkembangan dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing.

Hal ini terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia sebagai salah satu bidang utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat di dunia, baik dalam bidang perdagangan barang (*trade in goods*) maupun dalam bidang perdagangan jasa (*trade in services*). Karena dalam berinteraksi secara internasional satu sama lain dalam perdagangan dunia akan mengalami konflik dan perselisihan-perselisihan, maka negara-negara di dunia memerlukan suatu kesepakatan terhadap aturan main tertentu dalam suatu sistem perdagangan global.

Globalisasi yang terjadi saat ini di mana mengarah kepada suatu dunia seolah menjadi tidak terbatas (*borderless world*) telah menempatkan semua penduduk dunia dalam suatu perkampungan global, dimana menurut Kinichi Ohmae dunia terintegrasi tanpa batasbatas fisik. Perkembangan dunia di era milenium III ditandai dengan semakin pesatnya loncatan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan ini terasa semakin multi dimensi ketika dihadapkan pada tuntutan dan kebutuhan manusia yang beragam.

Kompleksitas ini semakin bertambah manakala dihubungkan dengan pola interaksi bisnis yang terjalin di masyarakat modern. Implikasi ini telah mengubah wajah perdagangan dan perekonomian dunia menjadi bentuk bisnis dalam perkampungan global (*business in global village*). Kondisi ini dengan tepat digambarkan Daniel Davidson: "*We are so*

economically interdependent on one another that We so live in global village". (Sunandar, 1998, 12) Riu rendah aktivitas tersebut pada akhirnya juga merambah bidang hukum yang notabene diharapkan senantiasa adaptif dan reaktif dalam merespon segala bentuk perubahan dan tantangan perkembangan zaman.

Globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi berbagai negara menjadi satu seolah-olah tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara. Salah satu ciri bisnis yang paling dominan pada globalisasi ekonomi adalah sifatnya bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal ini mempengaruhi pula terhadap berbagai peraturan di bidang bisnis yang dengan cepat pula mengalami perubahan.

Menurut William Irwin Thomson ((Sunandar, 1998, 12), bahwa, dengan dukungan teknologi dan informasi kecepatan perubahan tidak lagi menghitung abad, tahun, atau bulan, tetapi bisa terjadi setiap hari. Di berbagai pelosok, berlangsung transaksi bisnis tanpa mengenal penghentian, mulai dari penyiapan pertanahan Real Setate dan Industrial Estate seperti halnya investasi di bidang penanaman modal, pembentukan alat produksi, penyediaan bahan baku, perlengkapan dan perangkat kerja, pendistribusian produk dan transportasi darat, laut dan udara yang dibarengi dengan persetujuan asuransi, perdagangan, komunikasi, pembiayaan dan sebagainya.

Dalam dekade terakhir ini atau sering juga disebut sebagai era globalisasi, batas nonfisik antarnegara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung batas (*borderless state*). Dampak yang sangat terasa dengan terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai ke masyarakat.

Demikian juga halnya arus transportasi dari satu negara ke negara lain dapat begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini semua tentu berkat

dukungan teknologi yang terus digunakan dan dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan semakin dekatnya batas antara satu negara dengan negara lain peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas. Oleh karena itu tidaklah berlebihan, jika pakar ekonomi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengemukakan:

"Meningkatnya perekonomian di banyak negara ini, sebagai akibatnya adalah "interpedensi" pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan hanya pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi di dunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini peningkatan arus investasi itulah yang memacu arus perdagangan di dunia" (Bashri, 2003:12-13.).

Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara positif.

Kehadiran investor asing dalam suatu negara yang berdaulat memang dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing-masing. Pendapat tersebut antara lain ada yang mengekemukakan, kehadiran investor asing dapat mengancam industri dalam negeri sendiri dan bahkan mungkin mengancam kedaulatan negara. Permasalahan semacam ini, bukannya tidak disadari oleh negara penerima modal (*host country*). Perhatikan misalnya apa yang dikemukakan oleh B. Napitupulu:

"kebijakan Pemerintah RI dalam menghadapi modal asing menunjukkan suatu keinginan untuk memberikan proporsi yang wajar sebagai potensi ekonomi negara-negara asing melalui sistem seleksi dan pengarahan yang adequate dengan kedaulatan tunggal yang dimiliki" (Napitupulu, 1975:30).

Pendapat senada diungkapkan oleh Rusdin:

"Salah satu kritik terhadap globalisasi adalah meningkatnya ketergantungan antara ekonomi global, kekuatan ekonomi yang menggantikan dominasi pemerintah dan memfokuskan kearah organisasi perdagangan bebas (WTO). Ketika dunia ini menjadi satu pasar berakibat pada semakin kuatnya interpedensi atau saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya yang sama-sama mempunyai kedaulatan nasional. Jadi yang sebenarnya terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara lainnya, melainkan suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling memerlukan untuk mempertahankan keseimbangan politis, ekonomis dan tentu pula dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing negara" (Rusdin, 2002: 34.).

Oleh karena itu, terbukanya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, terlebih lagi bagi negara-negara yang selama ini menutup diri dengan dunia luar, mulai membuka diri. Hal ini berarti peluang untuk berinvestasi cukup luas. Negara penerima modal pun menyadari bahwa implikasi yang akan muncul dengan kehadiran investor asing di negaranya suatu hal yang sulit untuk dihindari. Dalam hal inilah dibutuhkan *leadership* yang kuat dari penyelenggara negara, sebab negara membutuhkan modal dalam membangun berbagai sektor. Modal yang dimaksud di sini, tidak semata-mata berupa dana segar (*fresh money*), akan tetapi meliputi teknologi (*technology*), keterampilan (*skill*) serta sumber daya manusia (*human resource*). Hal ini dengan cermat dikemukakan oleh Usha Dar dan Pratap K Dar:

"Most developing countries today believe that it is not possible for them to achieve their development aspiration entirely on their own and therefore, need the cooperation of other relatively more developed countries. This cooperation may take the form direct investment or sharing of technical know-how, skilled personal and

management expertise”(Dar dan Pratap K Dar, 1970: 1).

Pendapat di atas menguatkan dalil, bahwa modal dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam (*natural resource*) dan potensi ekonomi (*economic potential*) yang berada di bawah otoritas negara. Adanya pengelolaan secara optimal terhadap sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada, diharapkan ada nilai tambah tidak saja bagi negara akan tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Adapun wujud pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada tersebut antara lain dapat dilakukan oleh investor baik lokal maupun asing. Untuk investor asing pada umumnya merupakan Perusahaan Multi Nasional, PMN (*Multi National Corporation, MNC*). Jenis perusahaan ini hampir dapat dipastikan telah mempunyai jaringan bisnis yang cukup kuat di berbagai negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh J. Panglaykim:

"Beberapa alasan terjadinya investasi langsung luar negeri yang dilakukan lewat *MNC* yakni:

1. *MNC* memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan khas yang dimiliki oleh suatu perusahaan (*firm's specific advantage*);
2. Keunggulan lokasi (*location advantage*);
3. Internalisasi, termasuk pemilikan modal yang tidak terlihat dengan kasat mata (*intangible assets*) seperti keahlian di bidang pemasaran, manajemen dan teknologi. Selain keunggulan yang telah dikemukakan di atas, pada umumnya perusahaan yang berstatus *MNC* juga mempunyai: a. Jaringan kantor cabang dan informasi di tingkat internasional; b. Dukungan pemerintah; c. Konglomerat yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal dalam bisnis dan kelompok-kelompok industri. Berkat keunggulan inilah, pada umumnya *MNC* siap melakukan investasi langsung ke luar negeri” (Panglaykim, 1985:

8.).

Berkaitan dengan kehadiran investor asing di suatu negara, menarik menyimak pendapat yang dikemukakan oleh Robert Gilpin dan Jean Milles Gilpin:

"Para penerima investasi langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*) bersikap mendua menyangkut kegiatan *MNC*. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa *FDI* membawa modal dan teknologi berharga ke dalam negara. Di sisi lain, mereka takut didominasi dan dieksploitasi perusahaan-perusahaan yang kuat ini”(Gilpin dan Jean Mules Gilpin, 2002:173.).

Barangkali disinilah letak problematikanya, yakni di satu sisi kehadiran *FDI* sangat dibutuhkan, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang. Di sisi lain, ada kekhawatiran berbagai pihak investor hanya berpikiran bisnis. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Bob Sugeng Hadiwinata mengemukakan:

"Ada sejumlah pakar ekonomi yang mengaitkan ekspansi PMN ke negara berkembang dengan dampak positif yang ditimbulkan oleh aktivitas PMN sehingga mendorong pemerintah negara berkembang untuk lebih membuka diri bagi investasi asing. Mereka pada umumnya bersepakat bahwa negara berkembang menginginkan investasi asing karena manfaat langsung yang dapat dirasakan dari kehadiran PMN. Selanjutnya dikemukakan: Dampak positif dari kehadiran PMN yakni pertama memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu negara; kedua menciptakan lapangan kerja baru dan ketiga modal yang dibawa oleh PMN dapat memperbaiki neraca pembayaran negara berkembang (Hadiwinata, 2002: 146)

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara

penerima modal; dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor; dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*). Dilihat dari sudut pandang ini, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah di mana *FDI* menjalankan aktivitasnya. Arti pentingnya kehadiran investor asing dikemukakan oleh Gunarto Suhardi:

"Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung:

- a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk.
- b. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal.
- c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi
- d. Bila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara.
- e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing.
- f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan" (Suhardi, 2004: 45).

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (*business oriented*), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan.

Untuk dapat mengatasi hal ini, maka Pemerintah telah melakukan perubahan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing menjadi Undang-Undang

Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 LN RI Nomor 67 Tahun 2007, TLN RI Nomor 4724 Tahun 2007 sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal ini izin investasi.

Dengan diberlakukan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah LN RI Nomor 244 Tahun 2014, TLN RI Nomor 5587 Tahun 2014 memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah setempat untuk memajukan daerahnya dengan cara mendatangkan investor untuk melakukan investasi di wilayahnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1).

Keberadaan dari Undang-Undang tersebut berdampak pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah untuk memberi peluang investasi bagi daerahnya namun tidak memperhatikan ketentuan dari pembuatan Perda tersebut setelah Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 LN RI Nomor 57 Tahun 1994 TLN RI Nomor 3564 Tahun 1994. Dampak dari Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya akan menyulitkan bagi investor dalam melaksanakan investasinya yang terkadang sangat diskriminatif dengan adanya pembatasan terhadap operasional perusahaannya.

Mencermati berbagai pendapat tentang kehadiran investor, lalu timbul satu pertanyaan yakni apakah setiap permohonan investasi yang diajukan oleh investor asing harus diterima begitu saja oleh negara penerima modal ataukah investor asing harus mengikuti peraturan tentang penanaman modal yang ditentukan oleh negara penerima modal (Pemerintah dalam hal ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah membuat model aplikasi bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Model yang dimaksud dikenal dengan Model 1/PMA yang mengacu kepada ex. UU PMA 1967 dan

UU PMDN 1968.) ?

Dalam hal ini menarik disimak apa yang dikemukakan oleh Detlev F. Vagts:

"Suatu pemerintah yang mempertimbangkan sungguh-sungguh setiap usulan penanaman modal asing dihadapkan pada dilema antara hasrat untuk menggunakan penanaman modal tersebut sebagai sarana mencapai sasaran nasional tertentu dan adanya ketakutan kalau bermacam-macam nilai nasional akan terancam oleh penanaman modal tersebut. Yang mendukung dan yang melawan sulit untuk ditimbang atau dihitung dengan cara yang memuaskan. Godaan-godaan mengizinkan teori *lasses faire* berlaku cukup besar, namun karena pemerintah semakin jeli ketidaksamaan antara kepentingan nasional dan bisnis yang lebih berminat untuk menetapkan pembangunan ekonomi dalam pengawasan saksama yang terkoordinasi, mereka merasa lebih sulit membiarkan hal-hal tersebut berjalan sesuai dengan kemauan arah bisnis swasta" (Vagts, 1986: 68.).

Dalam bahasa lain, dikemukakan oleh Robert Gilpin dan Jean Milles Gilpin:

"Tak seorang pun yang menyangkal bahwa *MNC* telah menjadi ciri esensi ekonomi global dan semuanya mengakui bahwa upaya-upaya untuk mengembalikan izin ini "kembali ke dalam botol" tidak akan berhasil. Dengan demikian dibutuhkan suatu regulasi internasional untuk meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan maupun pemerintah-pemerintah bersikap dalam cara-cara yang menguntungkan ekonomi global" (Gilpin dan Jean Milles Gilpin, :74..).

Jika dicermati secara saksama pandangan penulis di atas, tampak bahwa suatu negara yang berdaulat mempunyai otoritas untuk mengatur negaranya termasuk masalah *FDI*. Artinya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk di negara tersebut harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh negara. Demikian juga halnya dengan Indonesia yang secara tegas telah mencantumkan dalam konstitusi atau

tepatnya dalam Undang-Undang Dasarnya, Indonesia adalah negara hukum. (Pasal 1 ayat 3, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dimaksud di sini adalah UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen beberapa kali. Dalam amandemen ketiga dengan tegas disebutkan *Negara Indonesia adalah negara hukum* Hal ini berarti seluruh aktivitas harus berdasarkan norma-norma hukum yang ada tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan dunia usaha dalam hal ini melakukan investasi.

Yang menjadi masalah adalah, apakah perangkat hukum yang terkait dengan investasi saat ini sudah memadai untuk menarik investor? Untuk menjawab pertanyaan ini, berbagai pendapat dikemukakan oleh para pakar, antara lain Juwono Sudarsono mengemukakan:

".. ada tiga hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan pengusaha Indonesia bila Indonesia benar-benar ingin berdaya saing terhadap negara-negara sedang berkembang lainnya. Ketiga hal itu adalah *legal, labour, local*. Pertama, Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan yang ramah bagi investasi dan perdagangan; Kedua, Indonesia harus membenahi masalah perburuhan, termasuk berbagai pengaturan yang menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor dan yang Ketiga, Indonesia harus membenahi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah" (Sudarsono, *Kompas*, edisi 9 Juni 2004).

Selain itu, ketentuan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai keadilan (*fairness*) dan dapat diprediksi (*predictable*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk:

"Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability, predictability*, dan *fairness*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk

menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertamakali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkahlaku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan” (Erman Rajagukguk, 2004)

Dapat dimaklumi mengapa investor membutuhkan adanya kepastian hukum sebab, dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini akan menjadi pertimbangan bagi investor, dalam melakukan investasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Charles Himawan:

"Peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya sehingga menimbulkan kekaburan akan hukum yang berlaku. Untuk memanfaatkan modal multinasional secara maksimal diperlukan kejernihan hukum." Selanjutnya dikemukakan: "Apabila hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati orang, baik orang yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat di sini kaitan antara manusia dan hukum. Dirasakan pula perlunya hukum yang berwibawa untuk menunjang pembangunan. Dalam konteks yang berlainan diamati perlunya kepastian hukum untuk menjamin arus modal (*capital flow*) ke Indonesia” (Himawan, 2003 :113-155)

Ada satu hal yang menarik dari pandangan yang dikemukakan oleh ilmuwan hukum di atas, yakni perlunya hukum yang berwibawa. Dengan kata lain berwibawanya hukum menjadi indikator hukum akan dipatuhi. Tampaknya hal ini

tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pemikiran yang mendasari lahirnya suatu norma hukum. Selain itu, waktu dan tempat berlakunya hukum juga cukup berpengaruh. Seperti yang diungkapkan oleh Steven Vago:

"Why do we need law, and what does it do for society? More specifically, what functions does law perform? A variety of functions are highlighted in the literature depending on the conditions under which law operates at a particular time and place (Vago, 1981: 54).

Pemikiran yang senada dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman:

"... hukum ditentukan secara tegas berdasarkan kebangsaan: hukum berhenti sampai diperbatasan negara. Di luar negaranya, hukum tidak sah sama sekali. Jadi tidak ada dua sistem hukum betul-betul serupa. Masing-masing sistem hukum bersifat khusus bagi negaranya atau yurisdiksinya. Hal ini tidak berarti bahwa sistem hukum sepenuhnya berbeda dengan sistem hukum lainnya”(Friedman, 2001: 19.).

Apa yang disampaikan oleh penulis di atas terlihat, bahwa tujuan dibentuknya hukum dapat dirumuskan dalam berbagai sudut pandang. Dalam kaitan itu, patut disimak pendapat yang dikemukakan oleh D. Notohamidjojo tentang tujuan hukum yakni:

"Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)". Selanjutnya dikemukakan: "Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen* yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika:

1. Memperoleh dukungan dari *value system* yang berlaku dalam masyarakat. Hukum ialah salah satu jenis norma dalam *value system* yang berlakunya akan lebih mudah apabila ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku;
2. Hukum dalam pembentukannya *ordeningssubject* atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma sosial yang berlaku;
3. Kesadaran hukum dari para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum rakyat menguat. Untuk itu rakyat harus dididik kearah kesadaran hukum yang baru;
4. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum (*Rechtszorg*) dan untuk menjadi penggembala hukum (*Rechtshoeder*). Pejabat hukum harus insaf, dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (*verbandssorde*)”.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:

“...tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat

sekarang. Oleh karena itu, terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti misalnya:..., kontrak yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya”.

Dari apa yang dikemukakan oleh para pemikir hukum di atas, menjadi jelas bahwa keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain terlebih lagi dalam lalu lintas bisnis sangat dibutuhkan. Adapun arti pentingnya hukum bagi masyarakat dikemukakan oleh W.F.de Gaay Fortman:

“Hukum dapat berbuat dalam lima hal yakni:

1. Mengatur dan menciptakan tata;
2. Menimbang kepentingan yang satu dengan yang lain;
3. Memberikan kebebasan;
4. Menciptakan tanggungjawab;
5. Memidana” (**Fortman, 1973: 6.**)

Jika arti pentingnya hukum dikaitkan dengan investasi, investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, bagi para investor butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran inilah yang disebut aturan yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas untuk itu. Aturan tersebut berlaku untuk semua pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo:

“Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai, dan adil. Fungsi dari kepastian hukum adalah tidak lain untuk memberikan patokan bagi perilaku seperti itu. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama” (**Kusumohamidjojo, 1999 : 150-151**)

Berdasarkan hal tersebut maka dalam mengupayakan kehadiran investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di daerah, Pemerintah Daerah seharusnya dalam menerbitkan peraturan daerah menyangkut bidang investasi harus dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di mana Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Dalam rangka pelayanan penanaman modal, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 telah memilih cara “pelayanan Terpadu Satu Pintu” sebagai suatu sistem pelayanan penanaman modal yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia (di pusat yaitu di BKPM, di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota), dilayani dengan pelayanan prima oleh karenanya dapat memenuhi batas waktu minimal penyelesaian perizinan/SOP (*Standard Operating Procedures*), sehingga dapat menciptakan kegiatan-kegiatan baru atau melahirkan proyek-proyek yang dapat mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi riil yang akhirnya menciptakan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

Apabila pada kenyataannya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai suatu sistem tidak/belum terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilihat juga dalam penelitian hal apa yang menjadi penyebab, apakah disebabkan oleh faktor ketidaksinkronan antara undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal (koordinasi), (Menjadi pendapat umum, koordinasi mudah diucapkan, sulit dilaksanakan) atau karena faktor lain berupa ketidaktaatan hukum yang selama ini diisukan sebagai unsur budaya.

Dalam kaitan dengan unsur budaya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum merupakan suatu unsur yang sangat menentukan apakah

suatu sistem hukum akan berjalan dengan baik atau tidak. (Friedman, 1984: 5)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pelayanan satu pintu dalam perizinan penanaman modal di Indonesia belum direalisasikan oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ?

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis pelayanan satu pintu dalam perizinan penanaman modal di Indonesia yang belum terealisasi oleh Pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

KERANGKA KONSEPTUAL

Pasal 1 butir 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal . Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan kegiatan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*Domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign indirect Investment, FII*). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk *portofolio* yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).

Mencermati peran penanam modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara di dunia dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang

berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Di lain pihak, dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya. Mengingat ada perbedaan sudut pandang antara investor dengan penerima modal, dirasakan perlu untuk mengakomodasikan kedua kepentingan tersebut dalam suatu norma yang jelas. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumantoro:

"Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan semacam ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerjasama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan."(Sumantoro, 1990:59.)

Untuk menyatukan antara kepentingan investor dengan negara penerima-penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya apa bila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor, mungkin saja para investor tidak akan datang lagi bahkan bagi investor yang sudah ada pun bisa jadi akan merelokasi perusahaannya. Disebut demikian, karena di era globalisasi ini, para pemilik modal

sangat leluasa dalam menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya. Untuk itu dalam menyikapi arus globalisasi yang tentu merambah ke berbagai bidang tersebut maka, peraturan perundang-undangan investasi asing langsung (*FDI*) di berbagai negara pun terus diperbarui sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin mengglobal. **(Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan investasi di berbagai negara dapat dilihat dalam 'Investment Laws Of The World, Volume I-X', yang dihimpun oleh International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Diterbitkan oleh Oceana Publications, inc/Dobbs Ferry, New York, Maret 2004. Ketentuan tentang hukum .nvestasi Indonesia, dijabarkan dalam volume iv, yang memuat antara lain UU No.1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970; PP. No. 20 Tahun 1994)**

Dengan kata lain dalam perspektif, dunia bisnis tidak lagi mengenal sekat-sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam perubahan kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor, khususnya di sektor informasi. Hal ini telah menimbulkan ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional terutama di bidang jasa keuangan. Menyikapi hal ini, maka sejumlah negara pun melakukan kebijakan liberalisasi di bidang investasi, antara lain membuka seluas-luasnya bidang usaha yang dapat dimasuki oleh investor asing yang sebelumnya tertutup. Selain itu prosedur untuk berinvestasi pun disederhanakan. **(BPHN, 1996:7)**

Era globalisasi dan liberalisasi perdagangan mewarnai milenium baru (abad 21). Dunia usaha terasa ibarat sebuah dusun *global (global village)*. Adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi, dan sektor-sektor kehidupan lainnya menyebabkan arus informasi semakin mudah dan lancar mengalir antarindividu atau kelompok. Batas-batas geografis

maupun negara sudah tidak signifikan lagi. Akibatnya konsumen semakin terdidik dan banyak menuntut. Tuntutan konsumen ini antara lain:

1. Produk berkualitas tinggi (*high quality*);
2. Harga yang wajar (*fair price*) disertai dengan cara pembayaran yang lunak dan alternatif pembayaran yang mudah;
3. Penyerahan produk yang cepat (*fast delivery*);
4. Layanan khusus (*special service*);
5. Produk yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi (*high flexibility*);
6. Akrab dengan pemakai (*user friendly*).

(Chandra. : 1.)

Jadi di sini terlihat adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang dapat membawa dampak cukup luas dalam dunia bisnis. Artinya, semakin mengglobalnya dunia bisnis, maka aliran modal pun akan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Modal akan berhenti atau tepatnya investor akan menanamkan modalnya di tempat yang peluang investasinya cukup kondusif. Salah satu faktor yang dijadikan parameter untuk menilai apakah tempat berinvestasi kondusif atau tidak, yakni adanya kepastian hukum. Artinya, apakah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang jelas. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yang sudah ada di depan mata yakni bagaimana menciptakan iklim investasi yang kompetitif dengan negara-negara lain yang juga tengah berupaya untuk menarik investor masuk ke negaranya.

Adapun bentuk atau model investasi ada beberapa versi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, (Trebilcock dan Robert Howse. 1995.,130) investasi langsung asing biasanya menggunakan satu dari tiga bentuk berikut: pemberian dana modal misalnya dalam *joint venture* atau pabrik baru; investasi baru untuk pendapatan perusahaan, dan peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau partnernya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu

penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan). (Dworkin, 1973 :250)

Penelitian hukum normatif terhadap sisi normatif hukum sebagai ilmu praktis normologis (dalam hal ini pembahasan mengenai adanya tumpang tindih Peraturan Daerah di bidang investasi, serta terdapat pula diskriminasi terhadap investor asing, menggambarkan bagaimana proses terjadinya suatu keputusan hukum, bagaimana pihak-pihak terkait mengisi suatu kekosongan hukum, menjelaskan norma-norma yang kabur, mempersempit pengertian suatu aturan hukum agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkret yang memerlukan penyelesaian hukum, bahkan menemukan aturan hukum. (Ibrahim, 2007:237)

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan utamanya *yuridis normatif*. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk usaha penemuan *hukum inconcreto*. (Soekanto & Sri Mamudji, 1985: 4-15.)

Analisis Data, adapun bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut kemudian dianalisis dengan cara:

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh, disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif.
- b. Kemudian ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara *yuridis* dan *historis*. Secara *yuridis* meliputi kajian hukum bisnis.

- c. Setelah analisis terhadap ketiga bahan hukum tersebut selesai dilakukan, maka hasil analisis yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan, dicocokkan dengan data primer atau bahan yang bersifat non hukum, yaitu: berupa hasil wawancara dari para narasumber, sehingga dari keduanya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti, khususnya berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. (Marzuki, :172-202)

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Mengacu kepada sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*. (Friedman, 1984:7)

Pertama, *structure*.

"First many features of a working legal system can be called structural the moving parts, so speak of-the machine Courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country's' legal process, the organization and framework of government. ". (Friedman, 1984:29)

Uraian Friedman di atas menunjukkan bahwa *structure* sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi-institusi yang diciptakan oleh sistem hukum mencakup yudikatif (pengadilan), legislatif dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Struktur dalam implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan

yang lain dalam suatu sistem hukum.

Kedua, *substance*. Berkaitan dengan *substance*, Friedman menyatakan:

"The second type of component can be called substantive. These are the actual products of the legal system-what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, those regulations of behavior that could be reduced to general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as is every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government." (Friedman, 1969: 27)

Uraian Friedman di atas menunjukkan bahwa substansi hukum meliputi hasil dari *structure* yang diantaranya meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan doktrin. Substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*).

"Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and the legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institution, either positively or negatively. Love of litigation, or a hatred of it, is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearing in so far as these attitudes affect behavior which is at least nominally governed by Law. The legal culture, then is general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society. "

Uraian Friedman di atas menunjukkan bahwa *legal culture* meliputi pandangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap budaya hukum sangat bervariasi, karena dipengaruhi sub

culture seperti etnik, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama) dan lingkungan. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.

Penggunaan teori Friedman berkaitan dengan sistem hukum, setidaknya karena tiga alasan; *pertama*, dalam kaitan dengan penanaman modal asing, pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing tidak hanya tergantung pada substansi, tetapi juga dipengaruhi cara kerja aparat hukum. Dalam menjalankan hukum, aparat hukum sangat dipengaruhi dengan budaya hukum, misalnya perijinan yang berkepanjangan, birokrasi yang lamban dan perilaku-perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. *Kedua*, munculnya, perkembangan dan formulasi kebijakan peraturan penanaman modal berlangsung dalam tatanan sosial yang dipengaruhi dengan nilai, harapan-harapan dan orientasi yang berkembang dalam masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan peraturan penanaman modal, seperti perijinan dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, nilai, orientasi dan kedudukan dari para pelaksana perijinan.

Menurut J.D. Ny. Hart terdapat tiga unsur yang harus dikembangkan dalam sistem hukum agar hukum berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu prediktibilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*), keadilan (*fairness*) (Theberge, 1980: 232)

Pertama, *predictability* (prediksi), yakni agar hukum dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, investor dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak.

Kedua, *stability*. Peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri. Melalui Undang-

Undang ini diharapkan akan mengakomodasi kepentingan buruh dan majikan, kepentingan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup yang bersih, kepentingan antara perusahaan besar dan usaha kecil-menengah. Dalam hal ini apakah hukum dapat mengakomodasi atau menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing di masyarakat.

Ketiga, *fairness* yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif. Aspek *fairness* (keadilan) seperti *due process*, persamaan perlakuan dan standar tingkah laku pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah dampak negatif tindakan birokrasi yang berlebih-lebihan. Tidak adanya standar keadilan, dikatakan sebagai masalah paling besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang tidak adanya standar tersebut dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi Pemerintah. (Theberge, : 232)

Pandangan lain menyatakan, bahwa yang dimaksud oleh *rule of law* untuk menarik modal asing yaitu adanya empat unsur, yaitu:

fidelity to sufficiently clear and instructive rules; rules of 'principled predictability' or fair certainty'; rules from valid, or legitimate, sources of governmental authority; rules from authority external to the individual (or governmental body) exercising legal power". (Coss, 2001:28.)

Fenomena hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum, ekonomi dan politik semakin menguat dari negara-negara maju ketika kapitalisme berkembang dengan konsep pertumbuhan ekonomi dengan mengajukan suatu ide bahwa ada hubungan yang erat antara kebebasan ekonomi dan politik. (Maorris and Irma Adelman, 1988:6-13.) Ada asumsi bahwa rezim yang represif dapat lebih menarik investor daripada rezim demokrasi yang sangat labil dengan perubahan dalam kepemimpinan dan hukum. Pemerintahan diktator yang

berorientasi pada pembangunan lebih berhasil dalam membangun infrastruktur, mobilisasi kapital, mengakumulasi dana yang diperlukan untuk industrialisasi. (Schlosser, Siegel and Samuel Huntington, 1965: 386-430.)

Selain itu, untuk menganalisa data yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penelitian ini juga menggunakan pendapat Douglass Nort yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, transparan, dan menjamin adanya kepastian dalam penegakan hukum (*predictability of enforcement*). (Schlosser, Siegel and Samuel Huntington, 1965:386-430.)

Teori-teori hukum di atas menunjukkan adanya fenomena yang saling mempengaruhi antara hukum, ekonomi dan politik. Fenomena semakin menguat di negara-negara maju ketika kapitalisme berkembang dengan konsep pertumbuhan yang mengajukan suatu ide bahwa ada hubungan yang erat antara kebebasan ekonomi dan politik. Ada asumsi bahwa rezim yang represif dapat lebih menarik daripada rezim demokrasi yang baru tetapi labil. (Tom Ginsburg, 2000:59)

Para ekonom bertambah banyak mempelajari pentingnya hukum bagi pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan. Faktor investasi dan produktivitas kerja jelas kritical untuk pertumbuhan ekonomi dan bagaimana faktor ini dapat didorong untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Ada yang berpendapat bahwa peraturan sukarela dapat menggantikan peran struktur hukum atau budaya lokal yang berbeda dan lebih penting secara ekonomi daripada institusi hukum yang baru. Teori ekonomi mengatakan dengan asumsi bahwa individu akan melakukan investasi untuk pertumbuhan ekonomi apabila ia mendapatkan imbalan dan investasi tersebut. Kemampuan untuk mendapatkan imbalan ekonomi tersebut dari suatu investasi tidaklah berjalan secara otomatis. Untuk mencapai hasil yang optimal adanya pengakuan terhadap hak milik yang spesifik dan penegakan hak milik yang tidak mahal. Tiadanya pengakuan

hak milik, insentif tidak akan cukup untuk mendorong adanya pertumbuhan.

B. Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-undangan

1. Ketentuan yang mengatur.

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung ide Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menyebutkan bahwa Negara menyelenggarakan kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk mengundang para penanam modal agar melakukan investasi di Indonesia dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya serta tujuan dari Negara hukum, maka investasi diarahkan untuk mencakup keadilan sebagai asas Kepastian Hukum baik mengenai kaidahnya, lembaganya maupun proses dalam pemberian perizinan. Untuk itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa semua kegiatan wajib memiliki izin yang diperoleh secara pelayanan terpadu satu pintu, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Amanat ini ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah (Pusat), Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

2. Pembagian Kewenangan Urusan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah membagi kewenangan antara Pemerintah (Pusat), Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membagi kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan oleh Pemerintah (Pusat)/PTSP BKPM.

Penyelenggaraan urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi ditetapkan sebagai urusan Pemerintah.

Contoh sederhana dari penanaman modal yang lintas provinsi adalah sebuah perusahaan perkebunan sebagian arealnya masuk provinsi A sebagian lagi masuk provinsi B. Ini namanya lintas provinsi. Manakala ada hal seperti ini dan permohonannya diajukan sekaligus untuk disetujui dalam satu ijin, maka penyelenggaraan urusan penanaman modal dilakukan oleh pemerintah pusat. (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan di bidang Urusan Pemerintahan, yang menyatakan urusan lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), dan bahan ajar Diklat BKPM Jakarta.)

Urusan pemerintahan lain di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah (Pusat) adalah :

Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi ;

1. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional ;
2. Penanaman modal terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi ;
3. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
4. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain ; dan
5. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah (pusat) dilaksanakan oleh BKPM melalui pendelegasian atau pelimpahan dari Menteri Teknis/Kepala LPNK yang mempunyai kewenangan dengan atau tanpa kuasa substitusi.

b. UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, diatur lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan di bidang urusan Pemerintahan, dan bahan ajar Diklat BKPM Jakarta. Penyelenggaraan oleh Pemerintah Provinsi/PPTSP Provinsi/PDPPM

Penyelenggaraan urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota (dalam satu provinsi) menjadi urusan Pemerintah Provinsi.

Contoh sederhana penanaman modal yang lintas kabupaten/kota adalah : Sebuah perusahaan perkebunan sebagian arealnya masuk kabupaten A sebagian lagi masuk kabupaten B (dalam satu provinsi). Ini merupakan lintas kabupaten dalam satu provinsi. Manakala ada hal seperti ini dan permohonannya diajukan sekaligus untuk disetujui dalam satu ijin, maka penyelenggaraan urusan penanaman modalnya dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Penyelenggaraan oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM).

Gubernur memberi pendelegasian wewenang (perizinan dan nonperizinan) yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala PDPPM.

Urusan pemerintah provinsi meliputi:

- a) Urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten.
- b) Urusan pemerintah (Pusat) yang dilimpahkan kepada Gubernur, dan pelimpahan kepada Gubernur ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM.

- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Pasal 12. Penyelenggaraan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/PPTSP Kabupaten/Kota (PDKPM). Penyelenggaraan urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
1. Penyelenggaraan oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
 2. Bupati/Wali Kota memberi pendelegasian wewenang (perizinan dan non perizinan) yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala PDKPM.
 3. Urusan pemerintah kabupaten/kota meliputi :
 - 1) Urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu kabupaten/kota.
 - 2) Urusan pemerintah (Pusat) yang diberi penugasan kepada bupati/wali kota. Penugasan ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM.

Menurut pendapat penulis, pembagian kewenangan perizinan penanaman modal antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota memuat unsur keadilan yang sangat mendukung *Grand Theory*.
 - d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lihat Pasal 25 ayat (4). Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 2. Dalam ayat (5) dinyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
 3. Dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pelayanan terpadu tersebut bertujuan membantu penanam modal memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.
 4. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
 5. Pasal 26 ayat (3) menyatakan : " ketentuan mengenai tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Presiden ". Peraturan Presiden itu adalah Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal.

3. Tatacara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengatur/tidak menetapkan instansi mana penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu, tetapi menyatakan bahwa "tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu" akan diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden sudah terbit yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Adapun pengaturan dilakukan sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. PPTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah (pusat) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP. PPTSP di bidang penanaman modals oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (disingkat PDPPM);
- c. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP . PPTSP bidang penanaman modal oleh pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (disingkat PDKPM);

Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tidak menetapkan bentuk instansi Penyelenggara PTSP. hanya menyebutkan PDPPM atau PDKPM, dengan demikian dimungkinkan berbentuk Kantor, mungkin juga berbentuk Badan serta tidak menyebutkan nomenklatur (tidak mengamanatkan keseragaman nomenklatur di provinsi, dan kabupaten/kota).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya hal ini ditindak lanjuti lagi dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal, tiga lembaga pemerintah tersebut, dengan surat Nomor : 570/37/27A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN.RB/9/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, yang ditujukan kepada Para Gubernur seluruh Indonesia dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang tidak menambah kejelasan mengenai badan atau instansi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Perangkat Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa bentuk organisasi daerah dapat berupa Kantor atau Badan (Kantor = Eselon III sedang Badan = Eselon II).

Demikian ketentuan peraturan perundang-undangan mengadakan pengaturan, yang menurut penulis pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang secara yuridis " kurang tegas pengaturannya", dan menurut penulis " kurang menjamin kepastian hukum", baik mengenai bentuk maupun penamaan instansi yang akan menangani penanaman modal. Hal ini akan mengakibatkan tidak ada kesamaan nama di provinsi/kabupaten dan kota di Indonesia.

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bersama.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/37/27A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN.RB/9/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, yang ditujukan kepada para Gubernur Seluruh Indonesia dan para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor, potensi ekonomi yang dimiliki daerah perlu digerakkan menjadi kegiatan ekonomi riil melalui penanaman modal. Untuk mendorong pencapaian hal tersebut, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan meningkatkan pelayanan

perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

- 2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal adalah kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- 3) Penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal di provinsi adalah perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) atau penyelenggara PTSP (PPTSP), dan penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal di kabupaten/kota adalah PPTSP kabupaten/kota.
- 4) Dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, instansi yang menyelenggarakan fungsi PTSP agar menyusun mekanisme kerja, tatalaksana dan bisnis proses berbagai jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan pelayanan di tingkat kecamatan.
- 5) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan penanaman modal, PDPPM dan PPTSP di kabupaten/kota harus didukung ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yang diintegrasikan dengan SPIPISE yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 6) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal :
 - a. Di tingkat provinsi :
 - i. Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal.
 - ii. Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang

penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM.

- iii. Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
- iv. Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar Gubernur segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
- b. Di tingkat kabupaten/kota :
 - i. Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP
 - ii. Bupati/walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.
- 7) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal, BKPM bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan:
 - a. Memberikan sosialisasi dan asistensi kepada aparaturnya yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, termasuk anggota DPRD dan dunia usaha di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Melakukan pelatihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal kepada aparaturnya yang terkait dengan penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
 - c. Melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota.

Surat Edaran Bersama ini memegang peranan penting dalam pelayanan penanaman modal dan dijadikan pedoman bersama dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal di daerah. Hal ini menjadi salah satu pembahasan yang mengakibatkan/mendukung bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 kelihatannya semakin tidak menjamin kepastian dalam pembentukan/penetapan instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Bidang Penanaman Modal.

5. Jumlah/hitungan Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Sampai dengan Tahun 2012, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 33 provinsi, 497 Kabupaten/kota dan 3 Kawasan Berikat (KPBPB) (data terlampir, lampiran 3). Badan Koordinasi Penanaman Modal, Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang sudah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu) apabila menerbitkan perizinan sesuai kewenangan (berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan), maka pemberian kode wilayah dalam penomoran perizinan tersebut adalah berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta memiliki data penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sampai dengan Desember 2012 tentang provinsi, kabupaten/kota yang oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal mengamanatkan agar menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Adapun jumlah provinsi berdasarkan data pada saat itu ada sebanyak 33 buah, kabupaten ada sebanyak 399 buah, kelompok kawasan sebanyak 3 buah, kota ada sebanyak 98 buah. Dengan demikian jumlah seluruhnya (provinsi, kabupaten, kawasan, dan kota)

ada sebanyak 533 buah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penerapan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal belum terlaksana di seluruh provinsi, kabupaten/kota. Selain itu instansi pelaksana perizinan penanaman modal secara pelayanan terpadu satu pintu tidak sama di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Demikian Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

a. Pembagian kewenangan dan sistem.

Pembagian Kewenangan telah dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga telah menetapkan " sistem" perizinan yang digunakan adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta ditetapkannya bidang usaha yang tertutup dan terbuka yang menjamin kepastian hukum (*certainty*).

Kewenangan dan sistem sudah berjalan dengan baik oleh instansi-instansi (di provinsi dan kabupaten/kota) yang sudah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, akan tetapi penyelenggara PTSP belum sama di setiap daerah..

b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi

Bidang Penanaman Modal (PDPPM), dan di Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM). Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sesungguhnya juga telah mengikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 itu, akan tetapi menetapkan bahwa penyelenggara perizinan penanaman modal itu adalah Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) (apapun namanya), bukan merupakan organisasi, mengakibatkan instansi yang menangani perizinan penanaman modal di Provinsi/Kabupaten dan Kota ditangani oleh instansi yang tidak sama. Oleh karenanya penanganan perizinan penanaman modal masa yang akan datang (perspektif) dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia dilakukan oleh Badan Penanaman Modal (sistem tetap sama yaitu secara pelayanan terpadu satu pintu), dan tidak hanya menangani perizinan, tetapi sekaligus menangani kegiatan penanaman modal lainnya seperti Promosi Penanaman Modal, Perencanaan Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- c. Berdasarkan pada data yang terdapat di BKPM Jakarta.

Dari hasil penelitian/survey di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, diperoleh data bahwa instansi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu berbeda-beda, nomenklatur pun tidak sama, tugas dan fungsinya pun tidak sama. Penulis berpendapat, penetapan nama yang tidak beraturan serta tugas dan fungsi yang tidak sama sangat tidak menciptakan suasana kondusif yang justru sangat diperlukan di bidang investasi.

- d. Penelitian/Survey di beberapa Provinsi. Dari hasil penelitian/survey yang dilakukan secara langsung di beberapa provinsi diantaranya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat diperoleh data bahwa urusan penanaman modal berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di Provinsi Sumatera Utara ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP), sedang di Provinsi Jawa Barat hal itu ditangani oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT). Di Provinsi Sumatera Utara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) menangani pelayanan terpadu satu pintu versi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perizinan Daerah (seperti IMB, HO, Izin Pesta, Izin Dokter, Pembuatan KTP, dll). Di Provinsi Jawa Barat Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) menangani kegiatan promosi, pengawasan pengendalian penanaman modal, sedang hal tersebut di Provinsi Sumatera Utara ditangani di Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP). (Sondang Simbolon, 2014:151)

KESIMPULAN

Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

Dari 33 provinsi 5 (lima) provinsi belum menyelenggarakan PTSP, dari 399 kabupaten baru 30 (tiga puluh) kabupaten yang menyelenggarakannya dan dari 98 kota baru merealisasikan PTSP sebanyak 11 kota. Bagi yang sudah menyelenggarakan PTSP sistemnya sudah baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya di Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak menetapkan Badan (nomenklatur pun berbeda) yang akan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan sudah baik, namun badan yang melaksanakan penyelenggaraan PTSP tidak sama mengakibatkan pelayananpun tidak sama, berpengaruh pula terhadap pencapaian target investasi/kesejahteraan masyarakat.

Penanganan perizinan penanaman modal di seluruh daerah di Indonesia di masa yang akan datang akan lebih baik apabila dilakukan oleh Badan Penanaman Modal, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, bukan dilakukan oleh Perangkat Daerah Bidang Penanaman

Modal Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga tidak saja memangkas birokrasi tetapi juga mempercepat tercapainya keadilan dan tercapai kepastian hukum bagi para penanam modal.

SARAN

Agar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diubah/direvisi. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar seragam di seluruh wilayah Republik Indonesia, yaitu dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi, Kabupaten/Kota.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bashri, Yanto (ed). *"Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti"*. Jakarta: Predna Media 2003,
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, New York-London: Norton Company, 1984
- Friedman, Lawrence M. "On Legal Development," *Rutgers Law Review*, Vol.23, 1969
- Gilpin, Robert dan Jean Mules Gilpin., *"The Challenge of Global Capitalism" (Tantangan Kapitalisme Global)* Penerjemah: Haris Munadar, Dudy Priatna. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed. 1.Cet 1, 2002
- Hadiwinata. "Bob Sugeng, *Politik Bisnis Internasional* Yogyakarta: Kanisius, Cet. 1, 2002
- Himawan. Charles *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cet. 1, 2003,
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet-III*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- James A. Black dan Dean J. Champion, 2001, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, terjemahan E. Koswara et. all. Cet. III, Bandung: Refika Aditama
- Kusumohamidjojo. Budiono. *Ketertiban Yang Adil Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo, Cet. 1. 1999.
- Napitupulu. B., *Joint Ventures di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1975
- Rajagukguk, Erman. *"Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial"*. Dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, Buku 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2004,
- Rusdin. *Bisnis Internasional dalam Pendekatan Praktik*. Jilid 1. Bandung: Alfabeta 2002,
- Suhardi., Gunarto *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2004
- Sudarsono, Juwono *"Tiga L Pemikat Investasi di Indonesia"*. Artikel dalam Surat Kabar Kompas, edisi 9 Juni 2004
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1985,
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada 1985,
- Simbolon, Sondang, (disertasi), FH. Jayabaya, 2014
- Sumantoro. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/ Problems of Investment in Equities and in Securities*. Bandung: Binacipta, 1990.
- Sunandar, Taryana *Globalisasi dan Perdagangan Bebas*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1998
- Usha Dar dan Pratap K Dar. *Investment Opportunities in ASEAN Countries*. New Delhi: Sterling Published Pvt, ltd 1970,
- Panglaykim, J. *"Era Pasca Minyak Identik dengan Strategi Eskpor Nasional"*. Dalam Analisa, Tahun XIV, No.1, Januari, 1985.